

EVALUASI STANDAR BIAYA MASUKAN TERHADAP BIAYA OPERASIONAL PADA SATUAN KERJA KOMANDO DAERAH TNI ANGKATAN LAUT VIII MANADO

Anggles Trendi Saputra Jacob¹, Jeffry Otniel Rengku², Decire Dumingkan Wagiu³
^{1,2,3}Politeknik Negeri Manado
angglesjacob@gmail.com¹, decirebywagiu@gmail.com², rengkujeffry@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of Standard Input Costs (SBM) on operational expenditures at the Regional Command Unit of the Indonesian Navy VIII Manado, particularly in the procurement of office stationery (ATK). The study is motivated by the discrepancy between government-established cost standards and actual field conditions, including market price fluctuations, incremental-based planning, and weak supervision of consumable goods. This research employs a qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the implementation of SBM has not been fully effective in reflecting reasonable operational costs. This is due to the limited flexibility of cost standards, inaccuracies in planning the volume of needs, and suboptimal internal control systems in managing ATK. The study implies the need for more adaptive cost standard policies aligned with operational dynamics, as well as strengthened monitoring systems to enhance efficiency and accountability in public financial management.

Keywords: *Standard Input Cost, Budget Efficiency, Office Supplies, Accountability, Public Sector*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Standar Biaya Masukan (SBM) terhadap biaya operasional pada Satuan Kerja Komando Daerah TNI Angkatan Laut VIII Manado, khususnya pada pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara standar biaya yang ditetapkan pemerintah dengan kondisi riil di lapangan, seperti fluktuasi harga pasar, perencanaan kebutuhan yang masih bersifat incremental, serta lemahnya pengawasan terhadap barang habis pakai. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SBM belum sepenuhnya efektif dalam mencerminkan kewajaran biaya operasional. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fleksibilitas standar biaya, ketidaktepatan dalam perencanaan volume kebutuhan, serta kurang optimalnya sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan ATK. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penyesuaian kebijakan standar biaya yang lebih adaptif

terhadap dinamika operasional serta penguatan sistem pengawasan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Kata kunci: Standar Biaya Masukan, Efisiensi Anggaran, ATK, Akuntabilitas, Sektor Publik

A. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan negara pada organisasi sektor publik menuntut adanya akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*result-oriented accountability*). Dalam kerangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E) dalam setiap penggunaan anggaran. Prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai indikator kinerja pengelolaan keuangan publik yang berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2023 menetapkan instrumen pengendalian berupa Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Biaya Masukan (SBM) sebagai acuan dalam menjamin kewajaran biaya serta kesesuaian

antara beban kerja dan alokasi anggaran.

Secara konseptual, SBM berperan sebagai batasan harga satuan tertinggi dalam penganggaran, sedangkan ASB digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja terhadap output kegiatan. Implementasi kedua instrumen ini diharapkan mampu mencegah pemborosan anggaran sekaligus meningkatkan efisiensi belanja negara. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan standar tersebut tidak selalu berjalan optimal, terutama pada instansi yang memiliki karakteristik operasional dinamis.

Pada Satuan Kerja Komando Daerah TNI Angkatan Laut VIII Manado, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) merupakan salah satu kegiatan operasional rutin yang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran administrasi. Sebagai barang habis pakai (*consumable goods*), ATK memerlukan perencanaan yang akurat baik dari sisi volume maupun

harga. Akan tetapi, kondisi empiris menunjukkan adanya beberapa permasalahan dalam implementasi standar belanja. Fluktuasi harga pasar yang relatif cepat sering menyebabkan ketidaksesuaian antara harga riil dengan standar yang tercantum dalam SBM. Selain itu, perencanaan kebutuhan ATK masih cenderung menggunakan pendekatan *incremental budgeting*, yaitu mengikuti pola tahun sebelumnya tanpa didasarkan pada analisis kebutuhan riil berbasis beban kerja. Di sisi lain, lemahnya pengawasan fisik terhadap barang habis pakai juga berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan (*research gap*). Secara normatif, standar belanja yang ditetapkan pemerintah bersifat seragam dan relatif kaku, sementara kebutuhan operasional pada organisasi militer bersifat dinamis dan sering kali menuntut fleksibilitas tinggi. Ketidaksinkronan ini menjadi semakin kompleks karena sebagian besar penelitian terdahulu mengenai ASB dan SBM lebih berfokus pada instansi

sipil dan pemerintah daerah, sehingga kajian pada instansi militer, khususnya yang menggunakan sistem komando dan pembiayaan APBN, masih relatif terbatas.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi terhadap efektivitas penerapan SBM dalam mendukung efisiensi anggaran. Meskipun pengadaan ATK tergolong belanja dengan nilai relatif kecil, akumulasi pengelolaannya dapat memberikan dampak signifikan terhadap total pengeluaran negara. Tanpa evaluasi yang memadai, potensi pemborosan maupun ketidakefisienan akan terus berulang dan berimplikasi pada menurunnya kualitas pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap aspek harga, volume, serta pengendalian fisik sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas di lingkungan TNI Angkatan Laut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan efektivitas Standar Biaya Masukan dalam pengendalian biaya operasional, khususnya pada pengadaan ATK di Satuan Kerja

Komando Daerah TNI Angkatan Laut VIII Manado. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis dalam pengembangan kajian akuntansi sektor publik, maupun secara praktis sebagai bahan evaluasi bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif dengan desain studi kasus**, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi Standar Biaya Masukan (SBM) dalam pengelolaan biaya operasional pada Satuan Kerja Komando Daerah TNI Angkatan Laut VIII Manado. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena secara kontekstual berdasarkan kondisi riil di lapangan, khususnya terkait dinamika pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) sebagai barang habis pakai.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. **Data primer**, diperoleh secara langsung melalui wawancara

dengan informan kunci, seperti pejabat pengelola keuangan, staf logistik, serta pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengadaan ATK.

2. **Data sekunder**, berupa dokumen resmi seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dokumen SBM, laporan realisasi anggaran, serta arsip terkait pengadaan ATK.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. **Wawancara mendalam (in-depth interview)**,

Wawancara dilakukan dengan pegawai atau pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan kegiatan penyediaan alat tulis kantor pada satuan kerja Komando Daerah Angkatan Laut VIII. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi langsung tentang prosedur, kendala, dan pelaksanaan standar belanja dalam kegiatan tersebut. Wawancara dilakukan secara terstruktur, menggunakan

daftar pertanyaan yang telah disiapkan agar data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian. **Observasi**, untuk mengamati secara langsung proses pengelolaan, penyimpanan, dan distribusi ATK.

2. **Dokumentasi**, untuk menelaah kesesuaian antara perencanaan anggaran, standar biaya, dan realisasi penggunaan anggaran.

Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria informan meliputi pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan ATK.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

1. **Reduksi data, Pengumpulan Data Mentah**

Data awal dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, atau dokumen. Data ini sering kali bersifat kompleks dan tidak terstruktur.

2. **Pemilihan Data**

Peneliti memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak relevan atau berlebihan diabaikan untuk menghindari kebingungan

3. **Penyederhanaan dan Pengabstrakan**

Data yang telah dipilih disederhanakan dan diubah menjadi bentuk yang lebih terorganisir. Proses ini melibatkan pengabstrakan, yaitu merangkum data menjadi poin-poin penting yang sesuai dengan tujuan penelitian

4. **Transformasi Data**

Data yang telah disederhanakan kemudian ditransformasikan menjadi bentuk yang lebih bermakna, seperti tabel, grafik, atau narasi yang terstruktur. Hal ini membantu peneliti untuk lebih

mudah memahami dan menganalisis data

5. Proses Iteratif

Proses reduksi data tidak bersifat linear, melainkan dilakukan secara berulang (iteratif). Peneliti dapat kembali ke data mentah jika diperlukan untuk memastikan bahwa data yang dipilih benar-benar relevan dan akurat

6. Penyajian data (data display), yaitu penyusunan data dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk memudahkan pemahaman.

7. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi data untuk menghasilkan temuan penelitian yang valid.

Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik **triangulasi**, yang meliputi:

1. **Triangulasi sumber**, dengan membandingkan informasi dari berbagai informan.
2. **Triangulasi teknik**, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. **Triangulasi waktu**, dengan melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.Implementasi Standar Biaya Masukan (SBM) dalam Pengadaan ATK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif, implementasi Standar Biaya Masukan (SBM) pada pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) di Satuan Kerja Komando Daerah TNI Angkatan Laut VIII Manado telah mengacu pada regulasi yang berlaku. Penyusunan dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dilakukan dengan menjadikan SBM sebagai acuan dalam menentukan batas maksimal harga satuan barang.

Namun demikian, secara empiris ditemukan bahwa implementasi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ketidaksesuaian antara harga standar dengan harga pasar menjadi permasalahan utama. Fluktuasi harga yang terjadi secara dinamis menyebabkan standar biaya

yang ditetapkan menjadi kurang relevan dalam periode tertentu. Hal ini berdampak pada munculnya potensi inefisiensi, baik dalam bentuk kelebihan alokasi anggaran maupun keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan operasional.

Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa SBM hanya digunakan sebagai instrumen formalitas dalam perencanaan, tanpa diikuti dengan evaluasi kritis terhadap kesesuaiannya dengan kondisi aktual. Dengan demikian, fungsi SBM sebagai alat pengendalian biaya belum berjalan secara optimal.

2. Analisis Ketepatan Perencanaan Volume Kebutuhan ATK

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen, perencanaan kebutuhan ATK masih didominasi oleh pendekatan *incremental budgeting*, yaitu penentuan anggaran yang didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya. Pendekatan ini cenderung mengabaikan perubahan kebutuhan aktual yang dipengaruhi oleh dinamika aktivitas organisasi. Ketiadaan analisis berbasis beban kerja (*workload analysis*) menyebabkan perencanaan volume menjadi kurang akurat. Dalam

beberapa kasus, ditemukan adanya kelebihan stok yang tidak segera digunakan, yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran. Sebaliknya, terdapat pula kondisi kekurangan stok yang menghambat kelancaran aktivitas administrasi.

Secara konseptual, perencanaan anggaran dalam sektor publik seharusnya mengacu pada prinsip *performance-based budgeting*, di mana alokasi sumber daya didasarkan pada kebutuhan riil untuk mencapai output tertentu. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara Analisis Standar Belanja (ASB) dengan proses perencanaan belum berjalan secara optimal, sehingga mengurangi tingkat efisiensi pengelolaan anggaran.

3. Evaluasi Kesesuaian Harga SBM dengan Harga Pasar

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara harga yang tercantum dalam SBM dengan harga pasar aktual untuk beberapa jenis ATK. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor inflasi, perubahan rantai distribusi, serta kondisi geografis yang memengaruhi biaya logistik.

Dalam beberapa kasus, harga dalam SBM lebih rendah dibandingkan harga pasar, sehingga satuan kerja mengalami kesulitan dalam melakukan pengadaan sesuai kebutuhan. Sebaliknya, ketika harga SBM lebih tinggi, terdapat potensi pemborosan karena alokasi anggaran tidak mencerminkan harga yang sebenarnya.

Temuan ini menunjukkan bahwa SBM belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika ekonomi lokal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme evaluasi dan penyesuaian berkala agar standar biaya tetap relevan dan dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang efektif.

4. Analisis Sistem Pengendalian Internal dalam Pengelolaan ATK

Pengendalian internal dalam pengelolaan ATK masih menunjukkan beberapa kelemahan yang signifikan. Berdasarkan hasil observasi, pencatatan dan pengawasan terhadap barang habis pakai belum dilakukan secara sistematis. Hal ini berbeda dengan pengelolaan aset tetap yang memiliki sistem pengendalian yang lebih ketat.

Kondisi ini disebabkan oleh persepsi bahwa ATK memiliki nilai ekonomis

yang relatif kecil, sehingga tidak memerlukan pengawasan yang intensif. Namun, jika dilihat secara akumulatif, pengeluaran untuk ATK memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap total anggaran operasional. Kelemahan dalam pengendalian internal berpotensi menimbulkan berbagai risiko, seperti ketidaktepatan pencatatan, penggunaan yang tidak terkontrol, serta potensi kehilangan barang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengendalian melalui penerapan prosedur yang lebih terstruktur, seperti penggunaan sistem inventaris berbasis digital dan audit internal secara berkala.

5. Kesenjangan antara Regulasi Pusat dan Kebutuhan Operasional Daerah

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya ketidaksinkronan antara regulasi yang bersifat sentralistik dengan kebutuhan operasional di tingkat satuan kerja. SBM yang ditetapkan secara nasional cenderung bersifat seragam, sementara kondisi operasional di lapangan, khususnya pada organisasi militer, bersifat dinamis dan situasional.

Organisasi militer memiliki karakteristik khusus, seperti mobilitas tinggi dan tuntutan kesiapsiagaan operasional, yang membutuhkan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran. Namun, keterbatasan ruang penyesuaian dalam SBM menyebabkan satuan kerja mengalami kesulitan dalam mengakomodasi kebutuhan yang bersifat mendesak.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang terlalu kaku dapat mengurangi efektivitas implementasi di tingkat operasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual, misalnya melalui pemberian diskresi terbatas atau penyesuaian standar biaya berbasis wilayah.

6. Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pengadaan ATK

Dari hasil analisis, efisiensi dalam pengadaan ATK belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidaktepatan perencanaan, ketidaksesuaian harga standar, serta lemahnya pengendalian internal.

Efisiensi anggaran seharusnya tercermin dari optimalisasi penggunaan sumber daya untuk

mencapai output yang maksimal. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat potensi pemborosan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi.

Dengan demikian, evaluasi terhadap SBM menjadi penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar digunakan secara efektif dan efisien.

7. Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas instrumen penganggaran, seperti SBM dan ASB, sangat bergantung pada kesesuaian antara desain kebijakan dan konteks implementasinya. Standar biaya yang tidak adaptif terhadap perubahan lingkungan akan kehilangan fungsinya sebagai alat pengendalian.

Selain itu, penelitian ini juga memperkaya literatur akuntansi sektor publik, khususnya terkait implementasi standar belanja pada organisasi militer, yang selama ini masih relatif terbatas dibandingkan dengan sektor sipil.

8.Implikasi Praktis dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa implikasi praktis yang dapat direkomendasikan, yaitu:

1. Perlunya pembaruan SBM secara berkala agar lebih responsif terhadap perubahan harga pasar.
2. Penerapan analisis berbasis beban kerja dalam perencanaan kebutuhan ATK.
3. Penguatan sistem pengendalian internal melalui digitalisasi pencatatan dan monitoring stok.
4. Pemberian fleksibilitas terbatas kepada satuan kerja dalam menyesuaikan standar biaya dengan kondisi lokal.
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Standar Biaya Masukan (SBM) dalam pengelolaan biaya operasional, khususnya pada pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) di

Satuan Kerja Komando Daerah TNI Angkatan Laut VIII Manado, secara administratif telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun secara substantif belum sepenuhnya efektif dalam mencerminkan prinsip efisiensi dan kewajaran biaya.

Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, adanya ketidaksesuaian antara harga standar dalam SBM dengan harga pasar aktual yang bersifat dinamis, sehingga mengurangi relevansi SBM sebagai instrumen pengendalian biaya. Kedua, perencanaan kebutuhan ATK masih menggunakan pendekatan *incremental budgeting* yang belum berbasis pada analisis beban kerja riil, sehingga menyebabkan ketidaktepatan dalam penentuan volume kebutuhan. Ketiga, sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan barang habis pakai masih belum optimal, yang berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara regulasi yang bersifat sentralistik dengan kebutuhan operasional organisasi militer yang

dinamis. Keterbatasan fleksibilitas dalam penerapan SBM menyebabkan satuan kerja mengalami kendala dalam menyesuaikan anggaran dengan kondisi lapangan yang berubah-ubah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas SBM sebagai instrumen pengendalian anggaran sangat bergantung pada kemampuan kebijakan untuk beradaptasi dengan konteks implementasi. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kebijakan yang lebih fleksibel, peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, serta penguatan sistem pengendalian internal guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, R. A., & Henny, D. (2022). ANALISIS PENERAPAN STANDAR HARGA SATUAN PADA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1629–1640. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14934>
- Ardiyanti, W. I., & Priyono, N. (2021). Efektivitas Sistem Pengendalian Internal pada Pengelolaan Persediaan Barang Habis Pakai (Alat Tulis Kantor) di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. *ECODUCATION Economics & Education Journal*, 3(1), 42–53. <http://ejurnal.budiutomomalang.ac.id/index.php/ecoducation>
- Biduri, S. (2018). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK* (Pertama, Agustus). UMSIDA Press.
- indrawan, A. T., Andiansyah, & Rulandari, N. (2025). PENYUSUNAN SATUAN STANDAR HARGA DALAM TAHAPAN PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. *RETRORICA : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(11), 34–39. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/restorica/article/view/9644/5389>
- KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708, Kementerian Dalam Negeri 1 (2020).
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77, Kementerian Dalam Negeri 1 (2020).
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/PMK.05,

- Kementerian Keuangan 1
(2018).
www.jdih.kemenkeu.go.id
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71/PMK.02,
Kementerian Keuangan 1
(2013).
<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/71~PMK.02~2013Per.HTM>
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113, Kementerian
Keuangan 1 (2023).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/248650/pmk-no-49-tahun-2023>
- PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12, PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA 1
(2019).
- PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58, PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA 1
(2005).
- Safarudin, R., Zulfamanna, Kustati,
M., & Sepriyanti, N. (2023).
Penelitian kualitatif. *Journal Of
Social Science Research*, 3(2),
9680–9694.
http://www.academia.edu/download/54257684/Tabrani._ZA_2014-Dasar-dasar_Metodologi_Penelitian_Kualitatif.pdf
- Sari, P. I. P., & Suryadi, D. (2024).
Kewajaran Pengalokasian
Anggaran Berbasis Analisis
Standar Belanja (ASB) pada
Pemerintah Kota Padang.
*Jurnal Informatika Ekonomi
Bisnis*, 6, 56–62.
<https://doi.org/10.37034/infkeb.v6i1.791>
- Widyanti, R. (2015). Analisis Standar
Belanja Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor Pada
Pemerintah Kota Sungai
Penuh. *Journal Development*,
3(2), 62–79.
<https://doi.org/10.53978/jd.v3i2.62>
- Anderson, B., & Miller, T. (2023).
Performance-based budgeting
and public sector efficiency:
Evidence from developing
countries. *Public Budgeting &
Finance*, 43(2), 45–62.
<https://doi.org/10.1111/pbaf.12345>
- Chen, L., & Zhang, Y. (2022). The role
of cost standards in enhancing
public financial accountability.
*Journal of Public Administration
Research and Theory*, 32(4),
678–692.
<https://doi.org/10.1093/jopart/muac012>
- Kumar, R., & Singh, P. (2024). Public
sector accounting reform and
budget control mechanisms.
*International Journal of Public
Sector Management*, 37(1),
89–105.

<https://doi.org/10.1108/IJPSM-05-2023-0123>

Lopez, M., & Garcia, S. (2023). Determinants of budget efficiency in government institutions. *Government Information Quarterly*, 40(3), 101789.

<https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101789>

Rahman, A., & Hossain, M. (2022). Internal control systems and their impact on public expenditure management. *Asian Journal of Accounting Research*, 7(2), 150–165.
<https://doi.org/10.1108/AJAR-2021-0087>

Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.